

ANAK TERLANTAR HINGGA DISABILITAS DAPAT BANTUAN DARI PEMKAB KEBUMEN



Sumber Gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/06/19/pemkab-kebumen_43.jpeg?w=700&q=90

Isi Berita:

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinasos P3A) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 juta. Anggaran itu ditujukan untuk pemberian bantuan sembako kepada anak terlantar, gelandangan dan pengemis, disabilitas, dan rumah tangga miskin.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, total ada 520 orang yang mendapat bansos sembako dari program tersebut. Masing-masing dari mereka mendapat beras 9 kg, telur, minyak, roti, susu, dan daging ikan. Bantuan diberikan selama enam bulan.

"Pemberian bansos sembako masih menjadi hal yang dibutuhkan oleh para anak-anak terlantar, gelandangan dan pengemis, disabilitas dan rumah tangga miskin, karena itu tahun ini kita berikan kepada mereka sembako selama enam bulan," ujar Arif dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/6/2024)

Pemberian bantuan diberikan per dua bulan sekali, sehingga dalam enam bulan itu diberikan tiga kali. Adapun distribusi bantuan diberikan melalui pemerintah desa di lima kecamatan yang masuk dalam wilayah miskin ekstrem, yakni Kecamatan Alian, Sadang, Karangsembung, Karanggayam, dan Sempor.

Arif menambahkan, pihaknya telah menyiapkan bantuan untuk para disabilitas yang berada di luar panti berupa alat bantu, seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat, kaki

palsu dan lain sebagainya. Rencana bantuan akan diberikan pada bulan Juni tahun ini untuk 100 orang.

Pihaknya telah menyiapkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami cacat berat berupa uang sebesar Rp 1,3 juta, dengan jumlah total penerima sebanyak 140 orang. Bantuan tersebut dikirim langsung melalui rekening masing-masing.

"Insya Allah kita berikan pada bulan Agustus 2024, langsung ke rekening penerima manfaat sebesar Rp 1,3 juta per orang," ungkapnya.

Arif menuturkan, pemberian bantuan ini tentu saja merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat kecil yang layak dan pantas mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Ia menyebut pemberian bantuan ini akan terus berjalan setiap tahun.

"Saya berharap penyaluran ini dilakukan secara transparan, demokratis dan akuntabel sehingga masyarakat bisa sepenuhnya merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah tanpa ada pemotongan," tukasnya. (ega/ega)

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7397355/anak-terlantar-hingga-disabilitas-dapat-bantuan-dari-pemkab-kebumen>, "Anak Terlantar Hingga Disabilitas dapat Bantuan dari Pemkab Kebumen", tanggal 19 Juni 2024.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/06/19/siap-siap-pemkab-kebumen-bakal-gelontorkan-anggaran-rp-800-juta-untuk-golongan-ini>, "Siap-siap, Pemkab Kebumen Bakal Gelontorkan Anggaran Rp 800 Juta untuk Golongan Ini", tanggal 19 Juni 2024.
3. <https://suarapemerintah.id/2024/06/bupati-kebumen-dinas-sosial-siapkan-800-juta-untuk-bansos-semako/>, "Bupati Kebumen: Dinas Sosial Siapkan 800 Juta untuk Bansos Sembako", tanggal 20 Juni 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.³ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ *Ibid*

atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁴ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁶
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi